BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Suara Pembaruan
Subyek : Tata Ruang
Edisi : 16 Januari 2008
Halaman : 6

Penerapan Tata Ruang Harus Konsisten

[JAKARTA] Pemerintah perlu mencari formula yang tepat dalam hal koordinasi lintas sektor dan daerah dalam menangani persoalan bencana alam, khususnya yang diakibatkan oleh fenomena iklim. Kurangnya koordinasi membuat penanganan dampak bencana alam sangat lambat.

"Jangankan antisipasi bencana, respons atau reaksi terhadap dampak bencana pun sering kali terlambat. Selain itu, perlu penerapan tata ruang yang konsisten," ujar Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Herry Suhardiyanto, pada Simposium Meteorologi Pertanian VII, di Jakarta, Selasa (15/1).

Herry mengatakan, saat ini perlu ada sistem nasional penanganan bencana yang bisa dijadikan dasar untuk mengatasi persoalan yang terjadi selama ini, baik di bidang lingkungan maupun energi. Untuk mengurangi dampak bencana alam yang di hari-hari mendatang akan bertambah besar, Herry mengusulkan agar semua pihak, khususnya pemerintah daerah, agar menerapkan tata ruang secara konsisten dan melakukan konservasi terhadap lahan-lahan yang rusak.

Fenomena Iklim

Ketua Perhimpunan Meteorologi Pertanian Indonesia (Perhimpi), Yonny Koeswaryono, mengajak semua pihak agar memiliki perhatian yang lebih terhadap fenomena iklim.

Dia mengungkapkan, dari 1.429 kali bencana alam yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 2003-2005, sekitar 53,5 persen di antaranya terkait sifat iklim dan hidrologi, seperti banjir, kekeringan, longsor, dan badai.

Sementara itu, dalam jumpa pers mengenai kebijakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia, pengamat lingkungan, Naek Sinu Kaban, mengemukakan, degradasi lahan di berbagai tempat di Tanah Air juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan bertambah parahnya bencana banjir.

Saat ini, kata Naek, dari 192 juta hektare daratan Indonesia, sebanyak 70 juta hektare di antaranya masuk kategori kritis yang memerlukan penanganan khusus. Menurut dia, pembangunan kota yang selama ini tidak melihat kapasitas dan kemampuan lahan harus ditinggalkan.

"Perlu dilakukan *review* tata ruang, baik nasional maupun wilayah, dengan melandaskan perencanaan tata ruangnya dengan kemampuan lahan," katanya. [E-7]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup